

Implementasi Perencanaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Produktifitas Badan Usaha Milik Desa di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo

Jupianus Sitepu¹⁾ Feri Ananda²⁾

Fakultas Sosial dan Hukum Prodi manajemen , Universitas QualityManajemen

Fakultas Sosial dan Hukum Prodi manajemen , Universitas QualityManajemen

Email: jupianus.karona@gmail.com

Abstrak

BUMDes merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang perekonomian desa yang dapat membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam kegiatannya tidak hanya bertujuan pada keuntungan keuangan, namun juga bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terutama usaha yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta aset yang dimiliki desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Kecamatan Tigapanah belum semuanya dapat dikelola dengan baik, padahal tujuan dari pembentukannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan serta dokumen-dokumen yang berhasil peneliti kumpulkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Model implementasi kebijakan yang akan digunakan dalam studi ini adalah model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Model Van Meter dan Van Horn pada prinsipnya adalah implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari kebijakan publik, pelaksana kebijakan, dan kinerja kebijakan, Dalam strategi organisasi disarankan lebih mengutamakan program yang akan di buat dengan melihat visi misi yang telah di cetuskan sehingga apa yang menjadi tujuan dari BUMDes dapat di capai dikemudain hari, Strategi sumber daya lebih mengedepankan pemberian pelatihan yang tepat guna kepada masyarakat dan juga pengelolaan sarana dan prasarana lebih ditingkatkan pengadaannya yang lebih penting sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan baik serta Program yang di kembangkan lebih melihat kepada usaha atau program yang memberikan dampak yang signifikan kepada BUMDes dan juga masyarakat berupa usaha di sektor pertanian agar terciptanya keberlangsungan BUMDes di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi ,MSDM, Produktifitas

Abstract

BUMDes is an organization engaged in the village economy that can help and provide services to the community, and in its activities not only aim at financial gain, but also aim to support the improvement of community welfare. Especially businesses that can take advantage of the potential of natural resources and human resources and assets owned by the village. *The results of the study show that not all BUMDes in Tigapanah District can be managed properly, even though the purpose of their formation is to improve people's welfare. Based on the results*

of interviews and observations as well as the documents that the researchers managed to collect, there were several obstacles encountered in the management of BUMDes. The policy implementation model that will be used in this study is the policy implementation model according to Van Meter and Van Horn. The Van Meter and Van Horn models in principle are that policy implementation takes place in a linear fashion from public policy, policy implementers, and policy performance. In organizational strategy it is suggested to prioritize programs that will be created by looking at the vision and mission that have been sparked so that what is the goal of BUMDes can be achieved in the future, the resource strategy prioritizes the provision of appropriate training to the community and also the management of facilities and infrastructure is further improved, the procurement of which is more important so that the community can use it properly and the programs that are developed look more at businesses or programs that provide a significant impact on BUMDes and also the community in the form of businesses in the agricultural sector in order to create BUMDes sustainability in the midst of society.

Keywords: Implementation, HRM, Productivity

Pendahuluan

BUMDes sebagai suatu perusahaan milik desa yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa perlu adanya perencanaan yang matang tentang apa yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes. Selaras dengan itu maka, perlu adanya strategi dalam pengembangan BUMDes sehingga tidak adanya program yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Strategi dalam suatu organisasi adalah tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang diterapkan oleh pihak pimpinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini secara khas strategi merupakan sebuah hasil campuran yang terdiri dari tindakan- tindakan yang dilakukan secara sadar dan yang ditujukan pada sasaran-sasaran yang di tentukan serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghadapi perkembangan- perkembangan yang tidak dibayangkan sebelumnya, dan area tekanan-tekanan yang bersifat kompetitif yang dilancarkan. Sehubungan dengan pendapat di atas maka strategi pengembangan organisasi perlu di lihat dalam BUMDes sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan BUMDes dapat tercapai. Strategi tidak lepas dengan bagaimana perencanaan itu dapat terealisasikan dengan baik sehingga, apa yang menjadi visi misi organisasi dapat tercapai.

1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adlaah Bagaimana strategi perencanaan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Desa Lambar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi perencanaan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Desa Lambar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Definisi BUMDes Menurut Maryunani (2008) BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat setempat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang ada.

BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba). BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan apa yang menjadi inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi -potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan atau mamaksimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa).

Keberadaan BUMDes secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta untuk memperkuat perekonomian desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat dengan adanya BUMDes, desa diberikan hak penuh untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa intruksi dari pemerintah dan kelompok tertentu. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat desa dituntut untuk mandiri. Dalam hal ini untuk menopang sifat kemandirian dari pemerintah dan masyarakat desa maka diperlukan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, transparansi, serta sustainable agar BUMDes dapat dijalankan dengan baik dan optimal, selain itu harus didasarkan oleh kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak serta kemampuan setiap anggota untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi dan konsumen. Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititik beratkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pemerintah, desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi sosial ekonomi BUMDes harus mampu berkompetensi ke luar desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi prokduktif maupun konsumtif dengan pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, yakni hal ini mampu diwujudkan dalam pemenuhan pengadaan kebutuhan masyarakat desa yang tidak memberatkan seperti harga yang lebih murah dan mudah didapatkan dan lebih menguntungkan, tetapi dalam hal ini BUMDes harus tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan yang berlaku sebagai lembaga keuangan mikro.

Menurut Purnomo (2004) maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni :

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajatmasyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

1. Meningkatkan peranan masyarakat yang ada desa dalam mengelola sumber-sumber

pendapatan lain yang sah.

2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit-unit usaha desa.
3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerjamasyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah.

BUMDes sebagai lembaga pengembangan potensi desa diperkirakan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UU No. 6 tahun 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara substansial, UU No. 6 tahun 2014 mengerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan. Keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang memunculkan pusat ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, yaitu sebagai salah satu pembangunan desa bersifat mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan sebuah desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

Kabupaten Karo peneliti menggunakan teori menurut Kotter dalam Salusu (2008:104) dengan menggunakan tiga indikator yaitu

1. Strategi organisasi (Corporate Strategy)

Strategi ini berkaitan dengan apa yang menjadi perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru.

Pembatasan pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa hal tersebut.

a. Visi Menurut Kuncoro (2006) visi merupakan hal yang sangat penting sebagai arah strategi dan pedoman melaksanakan strategi yang diformulasikan. Visi yang baik (vision of succes) dapat didefinisikan sebagai deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh BUMDes Sipurenu setelah BUMDes Sipurenu mengimplementasikan strateginya yaitu dengan program yang dijalankan dan mencapai potensi sepenuhnya.

b. Misi Menurut Tunggal (2011:22) misi merupakan identifikasi bidang usaha yang dilakukan organisasi untuk beroperasi yaitu pelanggannya yang dilayani, produk, jasa yang disediakan organisasi dan lokasi tempat beroperasinya usaha. Misi hendaknya juga mengkomunikasikan tentang sebuah filosofi dasar yang akan mengarahkan pengurus organisasi dalam beroperasi.

2. Strategi sumber daya (Resource Support Strategy)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatiannya pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya penting yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja sebuah organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

- a) Sarana dan prasarana Menurut KBBI (2020) sarana adalah segala sesuatu hal yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu sebuah organisasi. Prasarana adalah segala sesuatu hal yang merupakan penunjang utama sebuah organisasi sehingga dapat terselenggaranya suatu proses.
- b) Sumber daya alam Menurut Ahmad (2019) Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita.
- c) Sumber daya manusia Menurut pendapat dari Sumarsono (2003:4) sumber daya

manusia (SDM) merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM menggambarkan kualitas sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam jangka waktu tertentu untuk dapat menghasilkan suatu barang dan jasa. d. Sumber daya finansial Menurut Delfa dkk (2019:105) sumber daya finansial adalah keuangan ataupun biaya yang digunakan dalam perencanaan strategik melalui pengadaan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu maksud tertentu.

3. Strategi program (Program Strategy) Strategi ini lebih memberi perhatian kepada implikasiimplikasi strategi dari suatu program tertentu yang ingin dijalankan. Apa kira-kira dampak yang diberikan apabila suatu program diperkenalkan atau dilancarkan, apa dampak yang diberikan bagi sasaran organisasi tersebut.

Menurut Silalahi (2005: 43) implikasi adalah akibat yang ditimbulkan oleh sebuah organisasi dari adanya implementasi suatu kebijakan atau program, yang dapat bersifat baik atau buruk terhadap pihak yang terkait yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan hal tersebut. Berkaitan dengan penelitian ini, bentuk indikator strategi yang paling relevan dengan penelitian ini diantaranya Strategi Organisasi (Corporate Strategy), Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy), dan Strategi Program (Program Strategy). Strategi organisasi dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi dilihat dari keterkaitan visi dan misi dengan program di BUMDes Sipurennu. Selanjutnya untuk Strategi pendukung sumber daya dapat berupa pemanfaatan sumber daya seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Kemudian untuk strategi program dapat berupa berbagai kegiatan peningkatan ekonomi pada unit usaha yang sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai sebuah organisasi, sehingga hasilnya juga dapat dirasakan langsung oleh sasaran organisasi tersebut. Untuk melihat strategi program tersebut dilihat dari dampak yang diberikan baik untuk organisasi maupun masyarakat.

METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel insidental yaitu teknik pengambilan sampel secara kebetulan dimana responden yang ditemui secara kebetulan dan dianggap cocok sebagai sumberdata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Dalam analisis ini peneliti melakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai informasi sehingga dicapai sebuah data yang relevan. Berikut langkah-langkah analisis yang peneliti lakukan:

1. Menetapkan tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini
2. Menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Menentukan data yang akan dianalisis.
4. Mencari data yang relevan.
5. Membangun hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan *e-marketplace* dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis dimasa pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan BUMDes

Implementasi pada dasarnya adalah serangkaian proses penerjemahan dari kebijakan menjadi aksi atau tindakan. Para implementator secara konsisten dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditentukan isi dalam kebijakan (Mulyadi, 2015). Sementara itu menurut Nugroho (2014) implementasi kebijakan merupakan suatu cara bagaimana cara mencapai sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan public dapat diimplementasikan dengan cara langsung mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program atau membuat turunan dari kebijakan tersebut. Pengaturan mengenai pengelolaan BUMDes di kecamatan Tigapanah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 10 Tahun 2017 tentang BUMDes. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan implementasi kebijakan BUMDes di Kecamatan Tigapanah adalah sebagai berikut:

Proses Pembentukan BUMDes

Setiap desa yang berkeinginan mendirikan BUMDes maka harus melalui proses musyawarah dengan melibatkan Kepala Desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat dan Kepala Dusun. Dari data-data yang berhasil dikumpulkan, memang proses pembentukan BUMDes melalui musyawarah yang tidak dilakukan sekali namun berkali-kali.

Hasil wawancara dengan Sitepu, tanggal 6 Mei 2023 misalnya bahwa proses pembentukan BUMDes dilakukan melalui musyawarah. Hasil ini juga diperkuat oleh Ketua BUMDes Desa Lambar bahwa proses pembentukan BUMDes dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam rangka membentuk kepengurusan, persetujuan BPD. Hasil dari musyawarah ini adalah adanya SK dari Kepala Desa.

Pembentukan BUMDes di Kecamatan Karo secara umum adalah untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Hal ini dapat dilihat dari Bidang usaha yang sesuai dengan potensi Desa. Sebagaimana keterangan dari ketua BUMDes Desa Lambar sebagai berikut:

“..BUMDes dibentuk atas dasar potensi desa, potensi desa Lambar diantaranya adalah konveksi, penggemukan ternak, budidaya ikan dan pengadaan sembako”. (Wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Bojongkunci, tanggal 6 Mei 2023).

Hasil wawancara ini juga sejalan dengan wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Lambar, yang menyatakan bahwa:

BUMDes dibentuk sesuai dengan potensi desa, sehingga BUMDes disini bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian dan jasa-jasa. (Wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Bojongmangu, tanggal 6 Mei 2023).

Dari hasil wawancara di atas maka setiap desa yang berkeinginan mendirikan BUMDes maka harus melalui proses musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kepala Desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat dan Kepala Dusun. Musyawarah dilakukan guna menentukan bidang usaha dan pengurus BUMDes.

Organisasi Pengelola BUMDes

Idealnya para pengurus BUMDes haruslah orang-orang yang memiliki

dua kemampuan sekaligus yakni mampu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai posisinya, sekaligus memiliki kemampuan komunikasi yang baik pada semua orang di desa mulai dari struktur pemerintahan, para pelaku usaha yang menjadi mitra BUMDes hingga konsumen dari usaha-usaha yang dijalankan BUMDes. Dalam proses rekrutmen pengurus ada hal yang menarik dimana narasumber menjelaskan bahwa rekrutmen pengurus BUMDes pengurus arisan bulanan para perangkat Desa yang selama ini sudah dianggap jujur dalam mengelola uang arisan.

Dalam struktur organisasinya BUMDes di Kecamatan Tigapanah secara umum terdiri atas penasehat, direktur BUMDes, Sekretaris, Bendahara, Pengawas. Struktur organisasi ini terus mengalami perkembangan, karena adanya penambahan unit usaha yang tidak hanya simpan pinjam namun juga pembukaan usaha pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Modal BUMDes

Modal awal BUMDes masih mengandalkan Dana Desa. Dari informasi wawancara yang diterima diketahui bahwa modal yang diberikan desa untuk BUMDes tidak selalu tetap, ada BUMDes yang mendapatkan suntikan modal dari dana desa sebesar Rp 100.000.000, namun ada juga yang hanya mendapatkan suntikan modal sebesar Rp300.000.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap Desa memiliki kebijakan tersendiri mengenai pengembangan BUMDes. Hal ini dikarenakan segala keputusan dari realisasi dana desa melalui mekanisme musyawarah desa. Dimana warga Desa memang masih menginginkan agar infrastruktur seperti parit juga bisa dibangun dengan dana desa.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum modal BUMDes seluruh desa mendapatkan suntikan dari Dana Desa. Ada BUMDes yang mendapatkan penyertaan modal dari masyarakat ataupun pihak ketiga. Kondisi ini memang sesuai dengan kenyataan bahwa BUMDes dianggap telah memiliki prospek secara bisnis, sehingga masyarakat mulai tertarik untuk berpartisipasi terhadap pengembangan BUMDes.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Hasil wawancara dengan narasumber dapat diperoleh informasi bahwa semua BUMDes di Kecamatan Tigapanah telah memiliki AD/ART BUMDes yang berfungsi sebagai aturan yang mengikat di dalam kepengurusan BUMDes dan pengaturan dalam melaksanakan usaha di BUMDes. Materi-materi substansi AD/ART dibahas melalui musyawarah Desa dan pada

akhirnya menjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam AD/ART.

BUMDes telah memenuhi syarat-syarat perumusan AD/ART yang baik dimana memuat antara lain nama dan kedudukan, visi dan misi, bentuk dan fungsi, status kepemilikan, struktur organisasi, kewajiban dan hak pengurus, tugas dan tanggung jawab pengurus, pengawas, operasional, forum pengambilan keputusan, permodalan, kegiatan usaha, ketentuan pinjaman, ketentuan simpanan, pembukuan, sisa hasil usaha. Dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes juga diatur mengenai mekanisme dari kewajiban dan hak pengawas, pengelola usaha BUMDes, usaha swakelola (ketentuan lebih lanjut mengenai unit-unit usaha), tahun buku dan perubahan.

Namun hasil menarik menunjukkan bahwa tidak semua pengelola memahami mengenai isi AD/ART dari BUMDes. Ketidapahaman mereka terhadap isi AD/ART BUMDes disebabkan oleh berbagai alasan, terutama alasan lupa dan bahkan ada yang mengaku tidak ikut serta ketika melakukan pembahasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya peningkatan sosialisasi yang lebih memadai mengenai isi dari AD/ART kepada para pengelola BUMDes.

Pada penelitian ini implementasi kebijakan BUMDes menggunakan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (Agustino, 2020).

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi BUMDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Kecamatan Tigapanah belum semuanya dapat dikelola dengan baik, padahal tujuan dari pembentukannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan serta dokumen-dokumen yang berhasil peneliti kumpulkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Model implementasi kebijakan yang akan digunakan dalam studi ini adalah model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

Ukuran dan tujuan kebijakan

Keberhasilan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik dapat tercapai jika kebijakan memiliki ukuran dalam keberhasilan kebijakan (Kasmad, 2013). Dengan demikian kebijakan publik dapat terealisasi jika standar dari kebijakan realistis dengan sosio-kultur pada level pelaksana (Agustino, 2020). Berdasarkan hal ini maka perlu dibuat indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan dengan jelas, sehingga tidak ada interpretasi yang tidak sinkron antara pembuat antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan (Kasmad, 2013).

Ukuran keberhasilan dari pembentukan BUMDes pada dasarnya adalah untuk meningkatkan 1) perekonomian desa. 2) pendapatan asli desa 3) pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4) pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Secara umum narasumber menyatakan bahwa adanya BUMDes di desa mereka dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan melihat BUMDes-BUMDes yang ada di kecamatan Tigapanah dapat dikatakan bahwa kebijakan BUMDes telah berhasil dilaksanakan karena dapat membantu perekonomian desa.

Sumber daya

Dalam pelaksanaan kebijakan publik diperlukan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya non manusia (Agustino, 2020). Guna mendukung pelaksanaan kebijakan maka pemerintah biasanya menyiapkan anggaran yang memadai, namun anggaran yang besar tidak menjamin suksesnya pelaksanaan kebijakan.

Dilihat sumber daya manusia atau SDM, menunjukkan bahwa kondisi pengurus inti dari BUMDes guna mendukung kelancaran dalam pengelolaan BUMDes belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari para pengurus inti dari BUMDes yang pada umumnya hanya lulusan SMA.

Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam berbagai program, pelaksanaannya melibatkan banyak lembaga atau organisasi. Dengan demikian perlu adanya dikoordinasi dan antar lembaga tersebut. Komunikasi antar organisasi atau lembaga diperlukan dalam rangka memudahkan dalam transfer informasi mengenai standar atau indikator-indikator dari pencapaian kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan dapat menentukan keberhasilan tidaknya dari implementasi kebijakan (Kasmad, 2013). Ada tiga aspek yang biasanya digunakan untuk menilai komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi menghasilkan pola komunikasi yang baik antar organisasi. Hasil pengamatan yang peneliti lakukan telah terjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak mengenai pengelolaan BUMDes. Dari aspek transmisi, misalnya sosialisasi mengenai pengelolaan BUMDes yang baik dari pihak terkait. Para pemangku kepentingan memahami bahwa isi kebijakan perlu ditransmisikan guna Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui beberapa cara seperti bimbingan teknis, seminar dan sharing pada forum BUMDes Kecamatan.

Ditinjau dari aspek kejelasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi-informasi mengenai pengelolaan BUMDes telah dikomunikasikan dengan jelas. Kejelasan ini membuat para pengelola BUMDes mengetahui kemana harus mendapatkan modal dan juga bagaimana mengembangkan BUMDes.

Aspek komunikasi selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi merupakan salah satu aspek dari komunikasi yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan yang konsisten antara isi kebijakan dengan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan para pelaksana kebijakan dan bahkan dapat menghambat para pengelola BUMDes dalam pengembangan usahanya.

Karakteristik Agen Pelaksana

Variabel ini terkait dengan dukungan dari implementator terhadap sebuah kebijakan publik. Implementator harus mendukung dari kebijakan publik. Karakteristik implementator dapat saja mendukung atau menolak terhadap kebijakan pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes belum didukung oleh agen pelaksana dalam hal ini adalah peranan penasihat, pelaksana dan pengawas. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun secara implisit dapat diambil kesimpulan bahwa belum maksimalnya peran dari penasihat, pelaksana dan pengawas mengindikasikan adanya penolakan dari keberadaan BUMDes di kecamatan Tigapanah.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi dan lingkungan

yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Secara sosial BUMDes dapat dilaksanakan karena didukung oleh masyarakat. Desa Bojongkunci misalnya bidang pekerjaan masyarakat adalah petani, pedagang dan buruh. Sehingga BUMDes yang dikembangkan dalam bidang Konveksi, Penggemukan ternak domba, budidaya ikan dan penjualan sembako. Adapun di desa Rancamulya mayoritas masyarakatnya adalah buruh, petani, pedagang dan karyawan swasta, sehingga bidang usaha BUMDes yang dikembangkan dalam bidang perdagangan dan jasa.

Dengan demikian pengembangan BUMDes di Kecamatan Tigapanah dapat berjalan karena keselarasan dengan kondisi sosial masyarakat. Bidang usaha yang mengakomodir kebutuhan masyarakat relatif akan lebih mudah mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha-usaha yang dikembangkan sejalan dengan kebutuhan mereka.

Sementara dalam aspek ekonomi, kebijakan BUMDes mendapat banyak hambatan terutama pada saat wabah Covid-19 menyebar di Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung. Sejak wabah Covid-19 teridentifikasi di Indonesia, program-program penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat mendukung semua program yang ditawarkan oleh pemerintah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak dapat berjalan maksimal karena desa harus memprioritaskan program-program yang terkait dengan penanganan covid-19. Adanya wabah covid-19 “memaksa” semua kegiatan untuk difokuskan pada bidang kesehatan dan masalah sosial. Dengan demikian kondisi yang saat ini terjadi di semua wilayah Indonesia bahkan dunia turut menghambat implementasi pelimpahan sebagian implementasi dalam pengelolaan BUMDes.

Disposisi implementor

Disposisi implementor terdiri atas tiga hal yaitu

1. Respon pelaksana kebijakan terhadap kebijakan, respon ini dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Respon dari pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah desa mengenai BUMDes adalah positif. Respon positif ini ditunjukkan dengan adanya alokasi dana desa untuk pengelolaan BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua BUMDes mendapatkan alokasi dari dana desa, sehingga BUMDes mendapatkan sumber modal.
2. Kognisi, merupakan sejauh mana para pelaksana program memahami mekanisme pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan aspek ini para pelaksana kebijakan juga telah memahami mekanisme pembentukan BUMDes. Dengan demikian secara kognisi paraimplementator sepenuhnya mendukung keberadaan BUMDes.
3. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Terkait dengan disposisi implementor pada aspek intensitas disposisi implementor dapat diketahui bahwa Kepala desa telah memahami bahwa kebijakan BUMDes secara nilai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Namun demikian tujuan mulia dari pendirian BUMDes oleh sebagian oknum masyarakat dan juga pamong desa dapat menjadi ancaman dari keberlangsungan usaha mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) di Desa Lambar Kecamatan TigaPanah Kabupaten Karo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi organisasi dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lambar Kecamatan TigaPanah Kabupaten Karo telah dilakukan dengan baik, dilihat dari keterkaitan antara program yang dijalankan dengan visi misi BUMDes yang memenuhi semua kriteria yang ada pada visi misi. Walaupun masih ada beberapa program yang belum dilaksanakan secara maksimal untuk memenuhi visi misi, yaitu wisata kuliner yang belum memberikan kontribusinya yang signifikan dilihat dari masih kurangnya lapak yang terbuka dari banyaknya lapak yang disediakan dan juga program pada sektor pertanian.

2. Strategi pendukung sumber daya dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lambar Kecamatan TigaPanah Kabupaten Karo belum maksimal dalam pengembangannya dilihat dari empat dimensi yaitu sarana dan prasarana, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

3. Strategi Program dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lambar Kecamatan TigaPanah Kabupaten Karo sudah terpenuhi dilihat dari dua dimensinya. Implikasi program terhadap organisasi dilihat dari program simpan pinjam yang memberikan keuntungan atau omset yang besar kepada BUMDes Sipurenu. Implikasi program terhadap masyarakat dilihat dari program simpan pinjam dapat membantu permodalan masyarakat kemudian usaha wisata kuliner dapat menjadi wadah untuk pengembangan bisnis kuliner masyarakat dan usaha warkop dapat menjadi tempat pertemuan dan juga tempat pembelajaran dari untuk masyarakat Desa Lambar

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran untuk lebih meningkatkan indikator-indikator keberhasilan Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lambar Kecamatan TigaPanah Kabupaten Karo, diantaranya sebagai berikut

:

1. Dalam strategi organisasi disarankan lebih mengutamakan program yang akan di buat dengan melihat visi misi yang telah di cetuskan sehingga apa yang menjadi tujuan dari BUMDes dapat di capai dikemudain hari. Strategi sumber daya lebih mengedepankan pemberian pelatihan yang tepat guna kepada masyarakat dan juga pengelolaan sarana dan prasarana lebih ditingkatkan pengadaannya yang lebih penting sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan baik

2. Program yang di kembangkan lebih melihat kepada usaha atau program yang memberikan dampak yang signifikan kepada BUMDes dan juga masyarakat berupa usaha di sektor pertanian agar terciptanya keberlangsungan BUMDes di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriska, Kateria. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. Universitas Lampung: Bandar Lampung

Hennidar P. A. & Lena S. (2017). Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta

M. Asrar As, Anwar Parawangi, Ruskin Azikin (2020). Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Liupukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Kajian Ilmu Mahasiswa Administrasi Publik. Vol. 1, no. 1.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3725>

Realita, Utama. (2019). Sinergitas Bumdes Sebagai Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Tunas Unggul Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Universitas Lampung: Bandar Lampung

Reza, M. Z. (2017) Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta). Universitas Padjadjaran: Bandung